



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
**UNIT KERJA** : DINAS KESEHATAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : HENDRIYANTO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 811381

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

**Rp. 9.000.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 299 m<sup>2</sup>/230 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA NGANJUK, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 299 m<sup>2</sup>/132 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA NGANJUK, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 850.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 182 m<sup>2</sup>/85 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA MALANG , HADIAH Rp. 1.500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m<sup>2</sup>/54 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m<sup>2</sup>/48 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m<sup>2</sup>/46 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 418 m<sup>2</sup>/100 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m<sup>2</sup>/133 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.900.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

**Rp. 118.500.000**

1. MOBIL, SUZUKI ERTIGA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
2. LAINNYA, SELIS SEPEDA LISTRIK Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

**Rp. 41.200.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	215.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	9.374.700.000
III. HUTANG	Rp.	1.730.248.744
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	7.644.451.256

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.